

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI SEKTOR USAHA HIBURAN



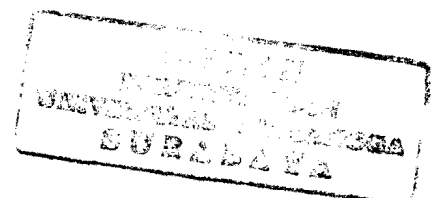
AN 17/05

Dew

P

YUANI RATNA DEWI
NIM. 030115205

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
DI SEKTOR USAHA HIBURAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing ,



Lanny Ramli, SH., M.Hum.
NIP. 131878338

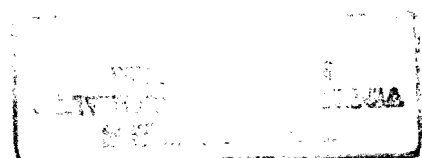
Penyusun,



Yuani Ratna Dewi
NIM : 030115205

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

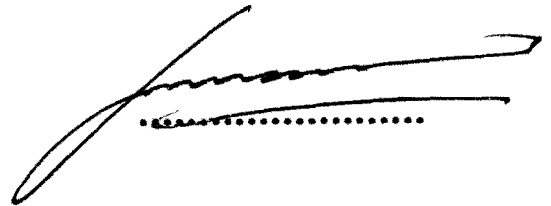
2004



**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal, 25 Oktober 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Machsoen Ali, SH,MS.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'M' followed by a series of connected loops and a final horizontal stroke.

Anggota : 1. Lanny Ramli, SH.M.Hum.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'L' and 'R' with a horizontal line underneath.

2. Dr. ML. Souhoka, S.H.,M.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. ML. Souhoka' with a horizontal line underneath.

BAB IV

KESIMPULAN

1. KESIMPULAN

Dalam penulisan skripsi ini saya berkesimpulan.

1. Bahwa perlindungan anak yang bekerja sebagai pekerja seni, belum menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah, selaku salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya hak-hak anak.
2. Bahwa masyarakat masih belum sadar sepenuhnya akan masa depan dari penerus bangsa tersebut, mereka masih terbuai dengan tradisi kuno yang menyatakan bahwa anak adalah hak milik yang sepenuhnya dapat diperlakukan dengan seenak hatinya, dan tidak menyadari bahwa anak tersebut hanyalah titipan dan penerus bangsa kita yang sudah sepatutnya kita ikut melindungi.

2. SARAN

1. Agar pemerintah lebih memperhatikan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak anak dengan cara membentuk suatu tim khusus yang bertindak sebagai pengawas terhadap keberadaan pekerja anak.
2. Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan kepada orang tua agar mereka sadar dan tidak selalu terbius dengan adat bahwa anak adalah hak milik, pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat

yang saat ini telah banyak berdiri dan pemerintah juga dapat bekerja sama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak.

3. Bahwa, masyarakat harus ikut aktif dalam membantu mengawasi keberadaan pekerja anak, minimal pekerja anak yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal.
4. Pemerintah harus memperbaiki atau merubah peraturan yang telah mereka buat agar para pelanggar tidak dapat mencari celah, sehingga mereka dapat dimintai tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan